

KASUS TUKAR GULING TANAH KODAM V/BRAWIJAYA Wiranto dan Subagyo Akan Bersaksi di Persidangan

Mbak Tutut dicoret
dari daftar saksi.

SURABAYA — Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Jenderal (Purnawirawan) Wiranto dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (Purn) Subagyo Hadisiswoyo akan bersaksi di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Jawa Timur. Demikian dikatakan penasihat hukum Letnan Jenderal (Purn) Djaja Suparman, Heru Samiaji, kemarin.

Djaja adalah terdakwa kasus korupsi tukar guling tanah Kodam V/ Brawijaya senilai Rp 13 miliar ke operator jalan tol PT Citra Marga Nusaphala Persada (CNMP). "Rencananya, dua minggu lagi keduanya akan bersaksi," kata Heru di sela sidang lanjutan Djaja

di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya kemarin.

Heru mengaku telah mengirim surat permohonan untuk menjadi saksi kepada kedua bekas pucuk pimpinan tentara tersebut, Wiranto dan Subagyo. Mereka atasan langsung Djaja ketika yang bersangkutan menjabat Pangdam V/ Brawijaya pada 1997-1998. Heru berharap keduanya akan memberi kesaksian yang meringankan Djaja. "Keduanya telah merespons (permintaan itu) dengan baik," ujarnya.

Kasus ini bermula ketika Djaja menerima permintaan *ruiislag* lahan dari PT CNMP. Perusahaan itu akan membangun jalan simpang susun bebas hambatan dari Waru, Sidoarjo; hingga ke Tanjung Perak, Surabaya. Kebetulan proyek itu akan melalui tanah Kodam Brawijaya seluas 8,8 hektare di

Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Surabaya.

PT Citra Marga pun setuju mengganti tanah Kodam dengan hibah Rp 17,4 miliar. Namun Djaja Suparman tak menyetorkan dana hasil tukar guling tanah negara itu ke kas Kodam. Dia malah mengelolanya sendiri untuk merenovasi gedung lantai 3 Markas Kodam Brawijaya, markas Batalion Kompi C Tuban, gedung Persit, gedung perwakilan Kodam Brawijaya di Jakarta, kantor Yayasan Kartika Jaya, dan Balai Kartika, serta memasang pagar di balai tersebut. Djaja juga membeli tanah di Pasrepan, Pasuruan, Jawa Timur, seluas 20 hektare. Total dana yang dihabiskan sekitar Rp 4 miliar. Sisanya, Rp 13 miliar lebih, dipakai dan dikelola sendiri oleh Djaja.

Dengan demikian, menurut Heru, keterangan Wiranto dan Subagyo

perlu didengarkan. Menurut Djaja, pelepasan tanah aset Kodam sudah dilaporkan ke atasan. "Semua sudah sesuai prosedur," kata Heru, yang juga advokat Lembaga Bantuan Hukum Pancasila.

Ia juga meminta oditur militer menghadirkan bekas Presiden Direktur PT CMNP, Siti Hardijanti Rukmana. Menurut Heru, keterangan putri sulung mantan presiden Soeharto itu menjadi penting dalam kasus ini. Namun Heru menyesalkan Tutut tidak masuk daftar saksi di persidangan. "Padahal dia yang memberi ancar-ancar harga tanah," kata Heru.

Dalam persidangan, bekas Asisten Logistik Komando Daerah Militer V/ Brawijaya Kolonel infanteri (Purn) Sujarwo mengatakan kasus ini tidak pernah dibahas oleh pimpinan militer saat itu. • KOMPAS & WIRANTO